



PETISI PEREMPUAN

PERTAHANKAN PILKADA LANGSUNG

Gerakan INDONESIA BERAGAM (Indonesia Berdaulat, Bersih, Sejahtera, Adil dan Majemuk) adalah Gerakan Perempuan membangun peradaban Indonesia yang bersih dari korupsi, bebas dari kemiskinan, bebas dari segala bentuk kekerasan dan rasa takut untuk mencapai keadilan dan kedaulatan bagi rakyat miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Sehubungan dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR RI, maka dengan ini INDONESIA BERAGAM menyampaikan Petisi Perempuan tentang PERTAHANKAN PILKADA LANGSUNG kepada **Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia**.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Kami Gerakan INDONESIA BERAGAM meminta agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung oleh Rakyat tetap dipertahankan.

Tuntutan ini didasarkan atas pertimbangan :

1. Pilkada langsung oleh Rakyat adalah wujud dari semangat dan tuntutan reformasi untuk mengembangkan budaya demokrasi dan partisipasi masyarakat.
2. Pilkada langsung oleh Rakyat merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi, dimana rakyat dapat secara langsung menentukan sendiri Pemimpin yang dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam pemenuhan hak-hak rakyat.
3. Pilkada langsung oleh Rakyat membuka ruang partisipasi Politik rakyat secara langsung untuk berdialog dan membangun kontrak politik dengan calon Kepala Daerah.
4. Kelompok masyarakat termarginal, seperti perempuan, kelompok disabilitas, nelayan, petani, buruh, masyarakat adat, pekerja informal dan yang lainnya, dapat menyampaikan pengalaman dan harapannya secara langsung kepada calon kepala Daerah.
5. Calon Kepala Daerah dapat berkompetisi secara setara, terbuka dengan prinsip *fairness* untuk memenangkan hati rakyat melalui program unggulan yang ditawarkan kepada rakyat.

6. Pilkada langsung oleh Rakyat membuka peluang bagi pemimpin-pemimpin yang baik jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat, dari berbagai kalangan masyarakat.
7. Pilkada langsung oleh Rakyat memberi peluang bagi pemimpin perempuan untuk menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

INDONESIA BERAGAM menyadari, bahwa berbagai pihak menggunakan alasan teknis seperti: mahalnya biaya pemilu, meningkatnya korupsi dan timbulnya tindak kekerasan sebagai alasan untuk mengubah system Pilkada langsung kembali pada sistem pilkada oleh DPRD.

INDONESIA BERAGAM memandang bahwa alasan-alasan bersifat teknis tidak cukup relevan untuk mengubah sistem politik, yang telah berhasil dilaksanakan selama ini. Disamping itu, alasan teknis tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yang juga bersifat teknis, seperti: efisiensi biaya, untuk menekan biaya penyelenggaraan pemilu dan pendidikan, peningkatan ketertiban dan keamanan serta penegakkan hukum untuk mengatasi berbagai tindak kekerasan.

INDONESIA BERAGAM berpendapat bahwa Korupsi bukanlah alasan yang tepat untuk mengubah Pilkada langsung menjadi Pilkada di DPRD, karena kasus korupsi terbanyak justru terjadi di DPRD. Pilkada di DPRD justru akan menyuburkan Korupsi di DPRD dan memperlemah kinerja Pemerintah Daerah.

Jakarta, 22 September 2014

INDONESIA BERAGAM

1. Aisyiah Jatim,
2. Aisyiah Pusat,
3. Aisyiah Sulsel,
4. AMAN Indonesia
5. Asosiasi LBH APIK Indonesia
6. ASPPUK
7. Balai Syura Aceh,
8. Fahmina,
9. FAMM_Indonesia
10. Federasi Beudoh Besare Aceh
11. Federasi Serikat Pekka Aceh
12. Federasi Serikat Pekka Sulawesi Tenggara
13. Federasi Serikat Pekka Sumatra Utara
14. Federasi Serikat Pekka Sulawesi Utara
15. Federasi Serikat Pekka Nusa Tenggara Barat
16. Federasi Serikat Pekka Nusa Tenggara Timur
17. Federasi Serikat Pekka Sumatra Barat
18. Federasi Serikat Pekka Sumatra Selatan

19. Federasi Serikat Pekka Jawa Barat
20. Federasi Serikat Pekka Jawa Tengah
21. Federasi Serikat Pekka Jawa Timur
22. Federasi Serikat Pekka DI Yogyakarta
23. Federasi Serikat Pekka Kalimantan Barat
24. Federasi Serikat Pekka Kalimantan Selatan
25. Federasi Serikat Pekka Sulawesi Selatan
26. Federasi Serikat Pekka Maluku Utara
27. FPMP Makassar
28. Gazira
29. GKI Yasmin,
30. GMKI Jailolo/Maluku Utara
31. GMKI Jayapura/Papua
32. GMKI Pekan Baru/Riau
33. GMNI Manokwari/Papua Barat
34. GMNI Pasuruan/Jawa Timur
35. GMNI Purwokerto/Jawa Tengah
36. GMNI Banten,
37. GMNI Kepulauan Riau,
38. Home Net Indo,
39. ICRP
40. IGJ
41. ILO Jatim,
42. INFID
43. Institut KAPAL Perempuan
44. ISRE Jember,
45. JALA PRT
46. Jaringan ABCD,
47. Kalyanamitra
48. KAP
49. Kaukus Pemimpin Buruh Perempuan
50. Kelompok Perempuan Cipayang (PMKRI, PMII, GMKI, GMNI)
51. Koalisi Perempuan Cabang Dompu,
52. Koalisi Perempuan Cabang Flores Timur,
53. Koalisi Perempuan Cabang Kabupaten Bima,
54. Koalisi Perempuan Cabang Kota Bima,
55. Koalisi Perempuan Cabang Mataram,
56. Koalisi Perempuan Cabang Ngada,
57. Koalisi Perempuan Cabang Pontianak.
58. Koalisi Perempuan Cabang Sikka,
59. Koalisi Perempuan Cabang Sumba Tengah,
60. Koalisi Perempuan Cabang Sumbawa,
61. Koalisi Perempuan Cabang Tarakan,
62. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (SEKNAS)
63. Koalisi Perempuan Wilayah Aceh,
64. Koalisi Perempuan Wilayah Bengkulu,
65. Koalisi Perempuan Wilayah DI Jogjakarta
66. Koalisi Perempuan Wilayah DKI Jakarta
67. Koalisi Perempuan Wilayah Jambi
68. Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Barat,

69. Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Tengah
70. Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Timur
71. Koalisi Perempuan Wilayah Nusa Tenggara Barat
72. Koalisi Perempuan Wilayah Sulawesi Selatan
73. Koalisi Perempuan Wilayah Sulawesi Tengah
74. Koalisi Perempuan Wilayah Sulawesi Tenggara
75. Koalisi Perempuan Wilayah Sumatera Barat
76. Koalisi Perempuan Wilayah Sumatera Utara
77. KPPA Sulawesi Tengah,
78. KPS2K Surabaya
79. KWS Poso,
80. Lakpesdam Cabang Tasik,
81. Lakpesdam Nu Kota Ambon
82. Lappan
83. LARD Mataram
84. LBH APIK Aceh
85. LBH APIK Bali,
86. LBH APIK Jakarta,
87. LBH APIK Makassar
88. LBH APIK Medan
89. LBH APIK NTB
90. LBH APIK NTT
91. LBH APIK Palembang
92. LBH APIK Palu
93. LBH APIK Papua
94. LBH APIK Pontianak
95. LBH APIK Samarinda
96. LBH APIK Semarang,
97. LBH APIK Yogyakarta
98. LBH Jakarta
99. LPSDM Lombok Timur
100. LSM Bali Sruti,
101. M16 Mataram,
102. Magenta Legal Research & Advocacy,
103. Mahina Ahuru
104. Migrant CARE
105. Mitra Pekerja Rumahan Indonesia,
106. NLC
107. Obor Perempuan Sulbar
108. Our Voice
109. PEKKA
110. Pembangkik Batang Tarandam,
111. Perempuan Mahardhika
112. Perkumpulan Japesda, Gorontalo
113. Permampu-Persada,
114. Pilar Manado
115. Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyah
116. PKBI Pusat
117. PMII cabang Solo,
118. PMII Cabang Tasik,

119. PPSW
120. Rindang Banua
121. Rindang Banua Pontianak,
122. RMI Bogor
123. Salut Manado
124. SAPA Indonesia
125. Sekolah Perempuan Mandiri Pamona,
126. Sekolah Perempuan Sintuwu Raya Malei,
127. Seniman-Lentera Pembebasan,
128. Serikat Perempuan Lembah Palu,
129. Sekolah Mombine (Sekolah Perempuan),
130. Solidaritas Perempuan
131. Solidaritas Perempuan Aceh,
132. Solidaritas Perempuan Jabotabek
133. Solidaritas Perempuan Makassar,
134. Solidaritas Perempuan Poso,
135. Suara Perempuan Manado
136. TURC,
137. Wanita Islam AlKhaerat Poso,
138. Yayasan Alfa Omega
139. Yayasan Bakti.
140. YKPM Makassar
141. ATKI